

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KESUKSESAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL**
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh)

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

NIA PERMATASARI S
2014/14043032

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KESUKSESAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

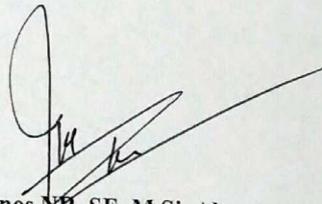
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh)

Nama : Nia Permatasari S
NIM/TM : 14043032 / 2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018

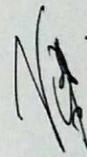
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Erinos R. SE, M.Si, Ak
NIP. 19580718 198903 1 002

Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KESUKSESAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh)**

Nia Permatasari S

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Email: niapermatasari47@gmail.com

Abstract

This study examine the effect of human resources quality, information systems, and the organization's commitment to the success implementation of accrual based government accounting standard. The population in this study was all SKPD in Sungai Penuh city as many as 32 SKPD. The sample in this study used a sampling technique total sampling. Analyses were performed using multiple regression models. These results indicated that the quality of human resources positive significant effect on the success of implementation of accrual-based accounting standard (sig 0.001). Information systems and organizational commitment does not affect the success implementation of accrual based government accounting standard.

Keyword : Quality of Human Resources, Information Systems, Organization's Commitment, The Success Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standard

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi terhadap kesuksesan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kota Sungai Penuh yaitu sebanyak 32 SKPD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual (sig 0,001). Sistem informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Kata kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi, Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrual.

1. PENDAHULUAN

Regulasi tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia selalu memberikan perubahan dalam perbaikan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah (SAP) (Ardiansyah, 2013). Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan sistem akuntansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reformasi keuangan negara menghasilkan tiga undang-undang penting yang pada dasarnya diterbitkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Ketiga undang-undang tersebut, yakni UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu dari UU tersebut, yakni tercantum dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Salah satunya dengan melakukan penerapan SAP berbasis akrual yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual untuk menggantikan peraturan pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang penerapan akuntansi berbasis kas.

Pemberlakuan PP No. 71 tahun 2010, maka standar akuntansi pemerintah (SAP)

berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan regulasi ini dengan tidak lagi menggunakan basis kas dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah, tetapi mulai menggunakan basis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut. Seluruh sektor pemerintahan harus sudah menerapkan basis akrual secara penuh (*full accrual*) pada tahun 2015. Perubahan SAP basis kas menuju basis akrual akan membawa dampak bagi pengelolaan keuangan negara (Putra dan Ariyanto, 2015).

Perubahan basis kas menuju akrual menjadi basis akrual dilakukan karena basis akrual memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada basis sebelumnya. Kelebihan basis akrual dapat dilihat dari adanya pengakuan pendapatan yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Dengan adanya pengakuan pendapatan maka akan terjadi peningkatan pendapatan karena kas belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan. Kelebihan tersebut dapat membuat pengelolaan serta penyajian laporan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Hal ini tidak berlaku pada basis kas yang hanya mencatat sebagai kas pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penyusunan standar akuntansi pemerintah sebagaimana dituang dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK).

Beberapa negara telah menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti Malaysia, dan Selandia Baru. Salah satu negara yang paling sukses menerapkan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik, yaitu Selandia Baru. Karena tingkat perubahan dalam manajemen sektor publik yang cepat dan inovatif sedangkan pada

negara Malaysia masih terdapat kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, yakni dalam hal keterbatasan tenaga akuntan yang berkualitas dan profesional (Saleh and Pendlebury, 2006; dalam Putra dan Ariyanto, 2015).

Praktek pembuatan laporan akuntansi basis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, masih mengalami kendala karena masih dalam transisi dari laporan berbasis kas. Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, kendala-kendala tersebut berada di kualitas sumber daya manusia, belum semua daerah memiliki sarana penunjang pengauditan, seperti audit elektronik dan masih ada yang belum mengetahui sudah dimulainya penerapan basis akrual untuk laporan keuangan daerah serta belum mengerti apa itu akrual (www.kompasiana.com). Pemerintah daerah di Indonesia belum seluruhnya menerapkan basis akrual dengan kendala sumber daya manusia yang belum memadai.

Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk periode 2014 dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan opini WTP. Capaian standar tertinggi ini juga diberikan kepada 62 kementerian/ lembaga negara, 26 Gubernur di Indonesia, 50 Walikota dan 149 Bupati di Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah Kota Sungai Penuh berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (jambi.bpk.go.id). Pemerintah Kota Sungai Penuh dikatakan telah sukses menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan serta terpadu. Dampak yang dihasilkan dalam penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat, sehingga pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pengenalan sistem

akuntansi yang baru adalah penting (Faud, 2013), selanjutnya dijelaskan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah untuk tingkat satuan kerja hanya sampai pada level tertentu yaitu 33,3% atau dengan kata lain masih sangat rendah, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2013), Putra dan Ariyanto (2015), Sukadana dan Mimba (2015) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kesiapan dan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, dengan tingkat yang masih rendah. Temuan ini diperkuat oleh Safitri (2017) yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa SDM menjadi faktor utama dalam membentuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Arih, Rahayu dan Nurbaiti (2017) menjelaskan dalam praktiknya, SDM yang memadai masih di katakan rendah. Padahal regulasi terkait SAP berbasis akrual telah ditetapkan dan diwajibkan bagi seluruh sektor pemerintahan.

Pada tahun 2017 dari 32 SKPD yang ada di pemerintahan kota Sungai Penuh, terdapat 21 SKPD mendapatkan rapor merah berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD triwulan I tahun 2017 dalam pengelolaan keuangan daerah (www.jambi.tribunnews.com) artinya masih banyak terdapat SKPD yang kinerjanya rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Safitri (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Sumber daya manusia yang tidak kompeten cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Hal ini nantinya bisa menjadi temuan yang mempengaruhi upayamempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil

pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa perangkat pendukung berupa sistem informasi yang ada pada sektor pemerintahan masih rendah, padahal memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan. Safitri (2017) menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Safitri (2015) menjelaskan peningkatan perangkat pendukung (*hardware* dan *software*) yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menerapkan SAP. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrizal (2017) menyatakan bahwa sistem informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan implementasi SAP berbasis akrual adalah komitmen organisasi/instansi yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Penelitian Marsdenia dan Arthaingan (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Temuan ini diperkuat oleh Safitri (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Arih, Rahayu dan Nurbaiti (2017) menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memahami para pegawainya, namun sampai saat ini masih ada pimpinan yang belum dapat menerapkan itu semua

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi maka peneliti ingin meneliti ulang mengenai kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual. Topik ini menarik untuk diteliti karena konsep ini masih tergolong baru. Basis akrual merupakan isu terhangat yang dihadapi oleh Komite SAP di Indonesia mengingat dengan

dikeluarkannya PP No.71 tahun 2010 yang mengharuskan pada tahun 2015 instansi pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan.

Kebanyakan peneliti meneliti terkait bagaimana kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual, karena pada saat ini pemerintah sudah mengharuskan akrual dan setiap pemerintah sudah menjalani SAP berbasis akrual. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini juga dikarenakan dalam setiap implementasi suatu kebijakan ada permasalahan atau tantangan yang akan dihadapi serta faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi standar akuntansi pemerintah basis akrual.

Peneliti mengambil objek penelitian pada Pemerintah Kota Sungai Penuh, karena opini audit Pemerintah Kota Sungai Penuh 3 tahun berturut-turut telah berhasil memperoleh opini WTP dan juga penelitian tentang kesuksesan implementasi standar akuntansi pemerintah basis akrual di Kota Sungai Penuh belum ada yang menelitinya.

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kesuksesan implementasi standar akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi standar akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Sungai Penuh ?
3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kesuksesan implementasi standar akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Sungai Penuh ?

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Institusional

Menurut DiMaggio & Powell (dalam Bahar, 2015) menjelaskan teori institusional adalah teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya serta berkeinginan mengungkap realitas ketidakkonsistenan dalam tampilan formal organisasi. Teori institusional memandang bahwa organisasi berubah belum tentu untuk mencapai efisiensi, tetapi demi kepentingan legitimasi dan homogenisasi dalam kelompok sejenis.

Penelitian ini relevan untuk menggunakan teori institusional karena suatu organisasi dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi institusi tersebut. Konteks yang melingkupi sektor pemerintahan yaitu adanya aturan dasar berupa aturan resmi, norma-norma dan aturan tidak resmi yang harus dipenuhi pada institusi tersebut. Basis legitimasi berupa hukum dan sanksi yang ada di operasional kerjanya jika melakukan pelanggaran terhadap aturan dasar. Kebijakan baru yang diterapkan pada lembaga pemerintahan harus mempertimbangkan konteks institusional yang ada pada organisasi tersebut.

Implementasi SAP Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010)

a. Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Hal ini menandai dimulainya satu

era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersial dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntansi Indonesia (IAI), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi, seperti dalam organisasi komersial (*Commercial Organization*). Pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah membutuhkan informasi yang digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak luar (Siregar dan Siregar, 2001; dalam Iznillah, 2015).

Pemerintah daerah memerlukan suatu standar akuntansi dibidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Ditetapkannya peraturan pemerintah (PP) SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara Internasional.

c. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Fakhurrazi (dalam Iznillah, 2015), manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. SAP dalam lingkup manajemen juga dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Manfaat lainnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan

penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

d. Basis Akuntansi Pemerintah

1) Akuntansi Berbasis Kas

PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kelebihan dari basis kas adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil, dan objektif, disisi lain basis kas juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, artinya tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik.

2) Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Kieso, dkk (2008) basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Praktek akuntansi pemerintah daerah di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasannya berpindah.

Basis akrual dianggap lebih baik dari pada basis kas. Basis akrual dinilai dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien, dan lebih memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut, maka pemerintah mewajibkan untuk mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual ini pada

setiap pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten (Fitrizal, 2017).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan /organisasi. Menurut Azhar (2007), sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia dalam suatu organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi, yang meliputi latar belakang pendidikan yang diperoleh responden, pemahaman tentang tugasnya, dan kesiapan melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsinya atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Fitrizal, 2017). Kapasitas sumber daya manusia harus dilihat dari kemampuannya untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcome). Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*), semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, maka semakin kuat tanggungjawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya (Aldiani, 2010).

Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah, SAP merupakan serangkaian proses manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data ,pencatata, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem

akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar.

Komitmen Organisasi

Menurut Robbins (2008) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauhmana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihak seseorang pada pekerjaannya yang khusus komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang memperkerjakannya.

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Kualitas SDM terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua

Sumber Daya Manusia memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrua. Hal ini didukung oleh Krumwiede (dalam Kusuma, 2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca (dalam Kusuma, 2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrua membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini yaitu perubahan dari basis kas menuju akrua ke basis akrua penuh (*full accrual*). Semakin baik kualitas SDM dan ketersediaannya dalam sektor pemerintahan, maka implementasi SAP berbasis akrua semakin baik. Hipotesis yang dibangun untuk kualitas SDM pada penelitian ini adalah:

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua.

b. Hubungan Sistem Informasi terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua

Safitri (2017) menjelaskan bahwa tentang sistem informasi yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrua. Ketersediaan komputer (hardware) dan program-program akuntansi pemerintahan (software) akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dalam menerapkan SAP berbasis akrua. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua.

Sistem informasi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini yaitu perubahan dari basis kas menuju akrua ke basis akrua penuh (*full accrual*). Sistem informasi akan sangat membantu pemerintah daerah untuk lebih cepat memproses pengolahan data, para pegawainya tidak akan melaksanakan tugas dengan cara manual. Semakin baik sistem informasi yang digunakan pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pengimplementasian basis akrua ini. Hipotesis yang dibangun untuk sistem informasi pada penelitian ini adalah:

H₂ : Sistem informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua.

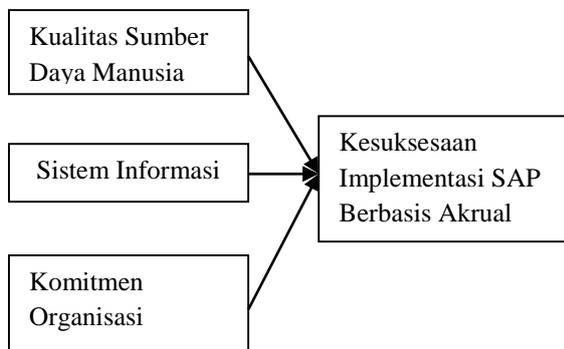
c. Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua

Menurut Robbins (2002:15), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotannya dalam organisasi tersebut. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki.

Semakin baik komitmen organisasi terhadap pegawainya pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dalam kesuksesan pengimplementasian basis akrual. Hipotesis yang dibangun untuk komitmen organisasi pada penelitian ini adalah:

H₃ : Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Kerangka Konseptual dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kausatif (*causative*). Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Sungai Penuh.

Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel (*total sampling*). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 kepala subbagian keuangan, 2 staf akuntansi/penatausahaan keuangan dan 1 teknisi informasi teknologi. Jumlah responden sebanyak 128 orang dari 32 SKPD yang terdapat di Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, sedangkan variabel independennya terdiri dari kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini masing-masing variabel akan diukur menggunakan skala likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan pendapat sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS) terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Gambaran kuesioner yang digunakan dapat dilihat pada lampiran.

Model dan Teknik Analisis Data

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Menurut Imam (2012) uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji coba validitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan pada 32 SKPD di Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Untuk menguji validitas ini menggunakan SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 21, untuk $n = 30$, α (alpha) 0,05 sehingga $r_{tabel} = 0,361$.

Jika $|r_{hitung}| \geq r_{tabel}$ = item valid

Jika $|r_{hitung}| \leq r_{tabel}$ = item tidak valid

2) Uji Reabilitas

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha*, yaitu instrumen dikatakan *reliable* jika memiliki *cronbach alpha* >0,6. Menurut Sekaran (2006) secara umum,

keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik.

b. Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika nilai sig > 0,05 maka dikatakan terdistribusi secara normal
- Jika nilai sig < 0,05 maka dikatakan tidak terdistribusi secara normal

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan *uji Glejser*. Uji Glejser menyusul untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

- Jika nilai sig > 0,05 maka tidak mengandung heterokedastisitas
- Jika nilai sig < 0,05 maka mengandung heterokedastisitas

3) Uji Multikolenearitas

Pengujian multikolenearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan.

Korelasi antara variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) dengan kriteria :

- Jika angka tolerance diatas 0,1 dan VIF < 10 dikatakan tidak terdapat gejala multikolenearitas.
- Jika angka tolerance diatas 0,1 dan VIF < 10 dikatakan terdapat gejala multikolenearitas.

Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan menggambarkan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis mean standar deviasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut.

b. Metode Analisis Data

1) Uji Regresi Berganda

Alat uji digunakan untuk regresi linear berganda. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana :

Y	= Kesuksesan Implementasi Basis Akruar
a	= Konstanta
$b_{1,2,3}$	= Koefisien Regresi
X_1	= Kualitas Sumber Daya Manusia
X_2	= Sistem Informasi
b_3	= Komitmen Organisasi
e	= Error

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

c. Uji Hipotesis

1) Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik.

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

2) Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen

secara baik. Hasil pengujian terhadap uji t adalah :

- Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
- Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
- Jika $\text{sig} > \alpha$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak.

d. Defenisi Operasional

1) Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua

Kesuksesan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah bagaimana pelaksanaan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia dalam suatu organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi, yang meliputi latar belakang pendidikan yang diperoleh responden, pemahaman tentang tugasnya, dan kesiapan melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Azhar, 2007).

3) Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang akan diorganisasikan, bilamana dieksekusikan akan menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian didalam organisasi (Jogiyanto, 2000).

4) Komitmen Organisasi

Menurut Robbins (2008) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauhmana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kuesioner yang disebar ke setiap SKPD, ada beberapa kuesioner yang tidak

kembali. Dikarenakan alasan SKPD yang mendapat tugas dinas luar dan ada juga terdapat kuesioner yang tidak lengkap diisi dan tidak dapat diolah karena kesibukan pegawai dalam pekerjaannya sehingga tidak fokus dalam mengisi kuesioner yang diberi. Jumlah kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti dan dapat diolah sebanyak 120 kuesioner. Kuesioner diantar langsung ke masing-masing SKPD dengan rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah 1 bulan. Gambaran penyebaran kuesioner dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Jumlah kuesioner yang disebar	128
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	3
Jumlah kuesioner yang kembali	125
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap diisi dan tidak dapat diolah	5
Jumlah kuesioner yang lengkap diisi dan dapat diolah	120
Respon Rate	94,53%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		120
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,57741064
Most Extreme	Absolute	,054
Differences	Positive	,043
	Negative	-,054
Kolmogorov-Smirnov Z		,594
Asymp. Sig. (2-tailed)		,872

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, didapat

bahwa nilai seluruh variabel dari Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,594 dengan signifikansi 0,872. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

b. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS di atas, bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan komitmen organisasi bebas dari gejala heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, bahwa untuk variabel kualitas sumber daya manusia dengan nilai VIF 1,486, variabel sistem informasi dengan nilai VIF 1,461, dan variabel komitmen organisasi dengan nilai VIF 1,102. Nilai *tolerance* untuk variabel kualitas sumber daya manusia adalah 0,673, variabel sistem informasi 0,684 dan variabel komitmen organisasi 0,908. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu sama lainnya, atau variabel independen pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Analisis Data

1) Koefisien Regresi Berganda

Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda, model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 15,960 + 0,245X_1 + 0,135X_2 + 0,043X_3$$

Dimana :

- X_1 = Kualitas Sumber Daya Manusia
- X_2 = Sistem Informasi
- X_3 = Komitmen Organisasi
- Y = Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa :

- a) Nilai konstanta sebesar 15,960 mengindikasikan variabel dependen yaitu kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua. Jika kualitas sumber

daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi bernilai nol, maka nilai kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua adalah sebesar konstanta atau 15,960.

- b) Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,245. Koefisien kualitas sumber daya manusia sebesar 0,245 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua sebesar 0,245 satuan.
- c) Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,135. Koefisien sistem informasi sebesar 0,135 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sistem informasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua sebesar 0,135 satuan.
- d) Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,043. Koefisien komitmen organisasi sebesar 0,043 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan komitmen organisasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua sebesar 0,043 satuan.

2) Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,170. Hal ini mengindikasikan bahwa 17% kesuksesan implementasi SAP berbasis akrua dapat dijelaskan oleh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi. Sedangkan 83% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dan dideteksi dalam penelitian ini

3) Uji F

Hasil pengolahan data menunjukkan hasil nilai F sebesar 9,101 dengan signifikansi 0,000^b. Jadi, $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9,101 > 2,68$ dengan nilai signifikansi $0,000^b < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

4) Uji t

a) Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual yang dilakukan dalam pengujian statistik. Pada hasil pengolahan data, bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,260 > 1,980$ atau $sig < \alpha$ yaitu $0,001 < 0,05$ dengan koefisien regresi (β) dari variabel X_1 bernilai positif yaitu $0,245$. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual dan kesimpulannya **hipotesis 1 diterima**.

b) Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual yang dilakukan dalam pengujian statistik. Pada hasil pengolahan data, bahwa sistem informasi memiliki, $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,105 < 1,980$ atau $sig > \alpha$ yaitu $0,271 > 0,05$ dengan koefisien regresi (β) dari variabel X_2 bernilai positif yaitu $0,135$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual dan kesimpulannya **hipotesis 2 ditolak**.

c) Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual yang dilakukan dalam pengujian statistik. Pada hasil pengolahan data, bahwa komitmen organisasi memiliki, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,943 < 1,980$ atau $sig > \alpha$ yaitu $0,347 > 0,05$ dengan koefisien regresi (β) dari variabel X_3 bernilai positif yaitu $0,043$. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif

terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual dan kesimpulannya **hipotesis 3 ditolak**.

Pembahasan

a. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrual

Penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas SDM dan ketersediaannya dalam sektor pemerintahan, maka implementasi SAP berbasis akrual semakin sukses. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2013), Putra dan Ariyanto (2015), Sukadana dan Mimba (2015), Fitrizal (2017), Safitri (2017) yang menemukan pengaruh signifikan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD), maka implementasi SAP berbasis akrual semakin sukses. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa SDM menjadi faktor utama dalam membentuk keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual, yang mana pada tahun 2015 instansi pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan.

b. Pengaruh Sistem Informasi terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrual

Penelitian ini memberikan hasil bahwa sistem informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian yang dilakukan Safitri (2015) yang menemukan pengaruh antara sistem informasi terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, namun

hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iznillah (2015), Marsdenia dan Arthaingan (2016) menemukan tidak terdapat pengaruh signifikan positif antara sistem informasi dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Tidak berpengaruhnya variabel sistem informasi pada penelitian ini salah satunya disebabkan oleh tidak banyaknya pegawai yang bisa beradaptasi dengan penggunaan sistem informasi dikarenakan kurangnya pelatihan serta pendamping operasional untuk peningkatan kualitas pengguna sistem informasi tersebut. Pertimbangan alasan lain mengapa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya adalah karena perbedaan subjek penelitian, perbedaan kondisi dan karakteristik responden inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrual

Penelitian ini memberikan hasil bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, semakin tinggi komitmen organisasi tidak memungkinkan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriзал (2017) yang menemukan tidak berpengaruh signifikan positif antara komitmen organisasi dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

Tidak berpengaruhnya variabel komitmen organisasi pada penelitian ini salah satunya disebabkan karena masih kurangnya komitmen dari atasan sehingga

perlu dilakukan trik dan inisiatif sendiri dalam mencari informasi mengenai akuntansi basis akrual.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Sungai Penuh
- 2) Sistem Informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Sungai Penuh
- 3) Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Sungai Penuh

b. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:

- a. Melakukan sosialisasi berupa seminar atau berbagai bentuk sosialisasi lainnya terkait dengan sistem akuntansi basis akrual kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Sungai Penuh, pimpinan SKPD harus mulai membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada implementasi sistem akuntansi basis akrual mengingat tahun 2015 instansi pemerintah telah melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan (*full accrual*).
 - b. Faktor sistem informasi, perlu adanya pendamping dalam operasional sistem informasi agar para pegawai bisa beradaptasi dengan penggunaan sistem informasi untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c. Faktor komitmen organisasi, perlu dilakukan kegiatan *capacity building* yang bersifat berkelanjutan dan memiliki benang merah dengan penilaian kerja individu maupun penilaian kinerja unit kerja. Sehingga setiap kegiatan yang mendorong motivasi dan komitmen kepada pemerintahan kota sungai penuh bisa langsung diterapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari mulai dari verifikasi bukti transaksi, input data transaksi, dan penyusunan laporan keuangan daerah.
2. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan agar dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena yang terjadi di pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Diharapkan dapat meneliti variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual seperti komunikasi, gaya kepemimpinan

yang terdapat dalam penelitian Putra dan Ariyanto (2015).

- c. Peneliti selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas (Pemerintah Pusat) atau lingkup di daerah lain yang berbeda karakteristiknya agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif sehingga dapat dijadikan gambaran atau pembandingan terkait kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual antara satu tempat dengan tempat lainnya.

c. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Peneliti telah memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai petunjuk pengisian dan maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan, peneliti kurang dapat mengendalikan jawaban dari responden, baik berupa pemahaman responden maupun verifikasi setiap jawaban dari responden sehingga dimungkinkan terjadinya bias dalam pengambilan keputusan penelitian. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan jumlah responden yang lebih sedikit, sehingga peneliti dapat mendampingi responden dalam pengisian kuesionernya.
2. Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim ke responden terpilih. Kuesioner yang disebarkan ke setiap SKPD sebanyak 128 kuesioner, namun yang berhasil terkumpul oleh peneliti dan dapat diolah sebanyak 120 kuesioner dikarenakan ada kuesioner yang tidak kembali dan kuesioner yang tidak lengkap diisi oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiani, Sulani. 2010. "Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu". *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*
- Andriani Y, Kober R., & Ng J. 2010. "Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers' Perception ". *Australian Accounting Review. 20(2), 323-335*
- Ardiansyah. 2013. "Factors Affecting The Readiness of PP No. 71 Tahun 2010 about Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1, No. 1.*
- Arih, Rahayu dan Nurbaiti. 2017. "Analysis of Factors Affecting The Implementation of Accrual Based Governmental Standards in Bandung City Government". *Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 17, No. 1, April 2017*
- Azhar. 2007. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh". *Tesis. Universitas Sumatera Utara.*
- Fadillah, Andi. 2013. "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)". *Skripsi. Universitas Hasanuddin*
- Fitrizal, Rian. 2017. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Solok Selatan)". *Skripsi. Universitas Negeri Padang*
- Fuad, M.I.Y.K. 2013. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua pada Pemerintah". *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2, No. 3, pp.1*
- <http://www.jambi.bpk.go.id> diakses pada tanggal 8 Oktober 2017
- <http://www.jambi.tribunnews.com> diakses pada tanggal 8 Oktober 2017
- <http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 4 Desember 2017
- <http://www.sungaipehukota.go.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017
- <http://www.wikiapbn.com> diakses pada tanggal 4 Desember 2017
- Iznillah, M Luthfi. 2015. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir". *Jom FEKON, Vol. 2, No. 2*
- Jogiyanto, Hm. 2000. *Sistem Infomasi Berbasis Komputer. Konsep Dasar dan Komponen. Edisi Kedua.* Yogyakarta: Bpfe
- Kieso, Donald E. Dkk. *Akuntansi Intermediate, Edisi Keduabelas, Jilid 1.* Terjemahan oleh Emil Salim. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi
- Putra dan Ariyanto. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13, No. 01, Hal. 14-32*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Republik Indonesia. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Rozaidy Mahadi, Dkk. 2017. "Accrual Accounting in Publik Sectors: Possible Contextual and Application Gaps fot Future Research Agenda". *Asian Journal of Finance & Accounting*, Vol. 9, No. 1, ISSN 1946-052X
- Safitri, Devi. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, Hal 174-189
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, B.H. 2010. "Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Sektor Pemerintahan Indonesia". *Presented at the Congress XI Institute of Indonesia Chartered Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI)*
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadana, I.C. dan Mimba, N.P.S.H. 2015. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Denpasar". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 12.1 : 35-49
- Tengku, Azman. 2015. "Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumber Daya Manusia serta Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI: Studi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti". *Skripsi. Universitas Riau. Jurnal Sorot*, Vol. 10, No. 1 april 2015.
- Warisno. 2009. " Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi". *Tesis. Universitas Sumatera Utara*.